BUPATI LANNY JAYA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LANNY JAYA
TAHUN 2014 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;

B bahwa ruang wilayah Kabupaten Lanny Jaya, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang daratdan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana untuk pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya Penduduk Kabupaten Lanny Jaya, serta kelestarian keanekaragaman hayati yang khas dan langka secara berkelanjutan;

C bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lanny Jaya;

D bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2014-2034;

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 886, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4412);

4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;

9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804;

10 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

11 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);

12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5324);

16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

20 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

21 Peraturan Daerah Khusus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21)

22 Peraturan Daerah Khusus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat

Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23)

23 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 14)

24 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA

Dan

BUPATI LANNY JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2014 - 2034

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lanny Jaya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Provinsi Papua adalah Provinsi Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
4. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
5. Bupati Lanni Jaya, selanjutnya disebut Bupati, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Lanny Jaya.
6. Daerah adalah Kabupaten lanny Jaya.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya sebagai badan legislatif Daerah Kabupaten Lanny Jaya.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelengaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan strutur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penataan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disebut RTRW kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
25. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
28. Kawasan ekosistem rentan adalah kawasan ekosistem yang karakteristik biofisiknya sedemikian rupa sehingga titik keseimbangannya sangat peka terhadap gangguan, baik yang bersifat terencana maupun tidak terencana, sehingga memerlukan perlindungan dan/atau kehati-hatian dalam pengelolaannya agar terjaga keberlanjutannya dalam jangka panjang.
29. Kawasan konservasi laut adalah perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
30. Kampung adalah suatu wilayah yang didiami oleh kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
31. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
32. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan

dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

34. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.
35. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
36. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
37. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
38. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
40. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
41. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
42. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
43. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
44. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
45. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
46. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
47. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
48. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat tertentu untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
49. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
50. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya ke danau atau laut secara alami melalui sungai utamanya.

51. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
52. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
53. Masyarakat adalah sekelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
54. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu pula dengan rasa solidaritas yang tinggi di antarapara anggotanya.
55. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat Papua asli yang berasal dari klan dan wilayah tertentu serta terikat dan tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
56. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
57. Hak Ulayat adalah hak kepenguasaan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
58. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
59. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ruang lingkup penataan ruang wilayah Kabupaten Lanny Jaya adalah seluruh wilayah Kabupaten Lanny Jaya.
(2) Batas administrasi wilayah Kabupaten Lanny Jaya adalah sebelah utara dengan Kabupaten Nduga, sebelah timur dengan Kabupaten Puncak, sebelah selatan dengan Kabupaten Puncak Jaya dan Tolikara dan sebelah barat dengan Kabupaten Jayawijaya
(3) Posisi geografis wilayah Kabupaten Lanny Jaya terletak antara garis koordinat 137^0 53’ 55” – 138^0 44’ 07” BT dan -3^0 44’ 08” – -4^0 08’ 04” LS.

Bagian Kedua
Lingkup Substansi

Pasal 3

Lingkup substansi mencakup :
a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
b. rencana struktur ruang wilayah;
c. rencana pola ruang wilayah;

d. penetapan kawasan strategis;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
g. kelembagaan; dan
h. peran masyarakat.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah
Pasal 4

Tujuan Penataan ruang wilayah adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis keraifal lokal dengan mengembangkan sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur lokal dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah, terdiri atas :

a. pengembangan pertanian sebagai sektor ekonomi unggulan, termasuk sumberdaya lokal;
b. pengembangan perikanan, pertambangan, dan kehutanan sebagai sektor ekonomi pendukung;
c. pengembangan sumberdaya wilayah sesuai daya dukungnya dengan mempertimbangkan bentang alam dan ekosistem khas sebagai faktor utama;
d. pengembangan manajemen resiko bencana;
e. pengembangan peran pusat kegiatan lokal dan pusat-pusat kegiatan lainnya sesuai dengan struktur dan hirarkinya;
f. peningkatan aksesibilitas eksternal dan internal wilayah;
g. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi;
h. pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan;
i. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sumber daya air;
j. pengendalian fungsi kawasan lindung;
k. pengembangan fungsi kawasan budidaya; dan
l. pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan sosial budaya, dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 6

1. Strategi pengembangan pertanian sebagai sektor ekonomi unggulan, termasuk sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
   a. mengembangkan kegiatan budidaya tanaman pangan, termasuk umbi-umbian, tanaman hortikultura, dan peternakan;
   b. mengembangkan pusat-pusat kegiatan berbasis agribis sebagai penggerak utama perekonomian wilayah;
   c. membangun iklim investasi yang kondusif; dan
   d. mengoptimalkan promosi peluang investasi.
2. Strategi pengembangan perikanan, pertambangan, dan kehutanan sebagai sektor ekonomi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

a. mengoptimalkan dan mengembangkan kegiatan perikanan air tawar, pertambangan, dan kehutanan; dan
b. mengintegrasikan sentra agribis dalam mendorong pengembangan sektor ekonomi pendukung.

3. Strategi pengembangan sumberdaya wilayah sesuai daya dukungnya dengan mempertimbangkan bentang alam dan ekosistem khas sebagai faktor utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,meliputi:
   a. memantapkan dan mengembangkan, dan mengendalikan fungsi kawasan sesuai karakter bentang alam hutan pegunungan; dan
   b. mengendalikan pengembangan fungsi kawasan sesuai sifat ekosistem di dalamnya.
4. Strategi pengembangan manajemen resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
   a. menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana;
   b. mengembangkan perencanaan sesuai zona kerawanan bencana;
   c. mengembangkan sistem pencegahan sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah;
   d. mengembangkan sistem adaptasi dan mitigasi bencana;
   e. mengembangkan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; dan
   f. mengembangkan sistem penanganan pasca bencana.
5. Strategi pengembangan peran pusat kegiatan lokal dan pusat-pusat kegiatan lainnya sesuai dengan struktur dan hirarkinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
   a. memantapkan peran Tiom sebagai ibukota kabupaten dan pusat kegiatan lokal;
   b. mengembangkan pusat-pusat pelayanan berdasarkan keseimbangan pelayanan sarana wilayah;
   c. menetapkan kegiatan utama pada pusat-pusat kegiatan agar masing – masing dapat berkembang sesuai potensinya;
   d. mengembangkan eksistensi masyarakat kampung dan sosial budaya;
   e. menyediakan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal secara merata; dan
   f. memantapkan sarana sosial ekonomi di pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan hirarki pelayanannya.
6. Strategi peningkatan aksesibilitas eksternal dan internal wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:
   a. meningkatkan pelayanan sarana transportasi penghubung ibukota kabupaten dan Pusat Kegiatan Wilayah;
   b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat dan udara yang menghubungkan distrik dengan ibukota kabupaten;
   c. mengembangkan sistem transportasi terpadu; dan
   d. mengoptimalkan fungsi bandara prasarana transportasi udara lain.
7. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
   a. mengoptimalkan dan mengembangkan jaringan telekomunikasi secara merata; dan
   b. memprioritaskan pengembangan jaringan telekomunikasi di ibukota kabupaten dan pusat-pusat kegiatan.
8. Strategi pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi:

a. mengoptimalkan pelayanan prasarana sumberdaya energi; dan
b. mengembangkan sumberdaya energi mikrohidro terbarukan.

9. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, meliputi:
   a. mengoptimalkan dan mengembangkan jaringan prasarana sumberdaya air.
10. Strategi pengendalian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, meliputi:
    a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
    b. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya;
    c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat;
    d. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata berkelanjutan;
    e. mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kelestarian lingkungan;
    f. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
    g. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung; dan
    h. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung.
11. Strategi pengembangan fungsi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, meliputi:
    a. mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi;
    b. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
    c. mengembangkan kegiatan industri terutama diarahkan pada agro-industri;
    d. mengembangkan kegiatan pariwisata alam;
    e. mengembangan permukiman yang aman, nyaman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan; dan
    f. mengembangkan kegiatan budidaya yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara.
12. Strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, meliputi:
    a. mendorong pengembangan sentra ekonomi berbasis pertanian; dan
    b. mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi :
   a. pusat-pusat kegiatan;
   b. sistem jaringan prasarana utama; dan
   c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan
Pasal 8

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perkampungan.

Pasal 9

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

a. Pusat Kegiatan Lokal ;
b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi; dan
c. Pusat Pelayanan Kawasan.

Pasal 10

(1) Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a yaitu Perkotaan Tiom di Distrik Tiom;
(2) Pusat Kegiatan Lokal Promosi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b terdiri atas ;
   a. Perkotaan Poga di Distrik Poga;
   b. Perkotaan Maki di Distrik Maki; dan
   c. Perkotaan Pirime di Distrik Pirimi
(3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, terdiri atas :
   a. Perkotaan Tiomneri di Distrik Tiomneri; dan
   b. Perkotaan Balingga di Distrik Balingga
(4) PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut di dalam Rencana Detail Tata Ruang.
(5) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

(1) Sistem perkampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f akan dikembangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
(2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Perkotaan Gamelia di Distrik Gamelia;
   b. Perkotaan Dimba di Distrik Dimba;
   c. Perkotaan Malagaineri di Distrik Malagaineri; dan
   d. Perkotaan Kuyawage di Distrik Kuyawage

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 12

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. sistem jaringan transportasi darat; dan
b. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 13

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

a. jaringan jalan; dan
b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; .

Pasal 14

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari :
   a. jalan provinsi; dan
   b. jalan kabupaten.
(2) Rencana pengembangan jalan nasional dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung, kawasan ekosistem rentan dan kawasan rawan bencana.

Pasal 15

1. Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi jalan Provinsi merupakan jalan kolekter primer, yaitu ruas jalan Tiom-Pyramid Kabupaten Jayawijaya
2. Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri dari :
   a. Jalan kolekter sekunder, meliputi :
      1. Ruas jalan ruas Tiom-Malagaineri-Kuyawage-Kabupaten Puncak;
      2. Ruas Tiom-Kabupaten Puncak Jaya; dan
      3. Ruas Tiom-Tiomneri-Kabupaten Tolikara
   a. Jaringan jalan lokal, terdiri atas :
      1. ruas Tiom-Malagaineri;
      2. ruas Tiom-Tiomneri;
      3. ruas Tiom-Makki;
      4. ruas Tiom-Pirime; dan
      5. ruas Tiom-Balingga

(2) Jaringan jalan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengacu kebijakan nasional jalan nasional, Keputusan Gubernur untuk jalan Provinsi dan Keputusan Bupati untuk jalan kabupaten

Pasal 16

(1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, berupa terminal tipe C :
(2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
   a. Tiom di Distrik Tiom; dan
   b. Poga di Distrik Distrik Poga.
(3) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. jalur angkutan barang meliputi:
      1. Tiom-Pirime-Makki-Kabupaten Jayawijaya; dan
      2. Tiom-Poga-Kabupaten Tolikara.
   b. trayek angkutan penumpang meliputi:
      1. Tiom-Pirime-Makki-Kabupaten Jayawijaya;
      2. Tiom-Poga-Kabupaten Tolikara;
      3. Tiom-Tiomneri; dan
      4. Tiom-Pirime-Balingga

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 17

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Bandara Pengumpan;
b. Ruang udara untuk penerbangan; dan
c. kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 18

(1) Bandara pengumpan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a, terdiri dari :
   a. bandar udara pengumpan di Distrik Tiom;
   b. Bandar Udara Tinggipura di Distrik Balingga;
   c. Bandar Udara Pirime di Distrik Pirime;
   d. Bandar Udara Kuyawage di Distrik Kuyawage;
   e. Bandar Udara Makki di Distrik Makki;
   f. Bandar Udara Dimba di Distrik Dimba;
   g. Bandar Udara Malagai di Distrik Malagaineri;
   h. Bandar Udara Danime di Distrik Gamelia; dan
   i. Bandar Udara Tiomneri di Distrik Tiomneri.
(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
(3) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 19

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
Pasal 20

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. pembangkit tenaga listrik; dan
   b. jaringan prasarana energi.
(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Distrik Tiom;

b. Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Makki, Tiomneri, dan Malagaineri; dan
c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Distrik Pirime, Kuyawage, Balingga, Poga, Gamelia, Dimba, Tiomneri, dan Malagaineri.

(3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. gardu induk di Distrik Tiom, Makki, Tiomneri, dan Malagaineri;
b. jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi saluran udara tegangan menengah Makki-Pirime-Tiom-Tiomneri, Makki-Gamelia-Dimba-Poga, dan Tiom-Balingga-Kuyawage;
c. jaringan distribusi minyak dan gas bumi, meliputi stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Distrik Tiom dan Gamelia.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 21

1. Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas :
   a. sistem jaringan Teresterial; dan
   b. sistem jaringan nirkabel;
2. Sistem jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibangun di Distrik Tiom Ibukota Kabupaten Lanny Jaya;
3. Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Pengembangan menara pemancar seluler dan menara telekomunikasi bersama yang tersebar diseluruh distrik;
   b. Pengembangan jaringan satelit di daerah terpencil di seluruh distrik; dan

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 22

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. wilayah sungai (WS);
b. cekungan air tanah (CAT);
c. jaringan air baku untuk air bersih;
d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
e. sistem pengendalian erosi dan longsor.

(2) Wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi WS Lintas Negara Einlanden-Digoel-Bikuma, mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) Einlanden.

(3) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi CAT Enarotali dengan pemanfaatannya mengutamakan air permukaan.

(4) Jaringan air baku air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. pembangunan dan pengelolaan saluran pembawa, pemeliharaan dan pengelolaan sumber air baku, serta pengolahan air baku;
b. pembangunan distribusi air baku yang dikelola secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan air bersih; dan
c. pengendalian kerusakan sumberdaya air di wilayah hulu.

(5) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi sistem jaringan perpipaan dan non-perpipaan di seluruh distrik.

(6) Sistem pengendalian erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pembangunan talud dan atau terassering di sepanjang jalan Tiom-Pirime-Makki.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan
Pasal 23

(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas :

a. sistem pengelolaan persampahan;

b. sistem jaringan air minum;

c. jaringan air minum ke kelompok pengguna;

d. sistem pengelolaan limbah;

e. sistem jaringan drainase; dan

f.jalur evakuasi bencana.

(2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Distrik Tiom dengan menggunakan sistem control landfill;

b. penyediaan Tempat Pengolahan Sementara (TPS) di Distrik Tiom;

c. pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah;

d. pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf c, yaitu dengan menerapkan konsep 3 R (reduce, reuse, recycle) meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah;

e. penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS; dan

f. penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

(3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. rencana sistem perpipaan air minum mengikuti alternatif pengembangan jalan dalam kawasan Kota Tiom; dan

b. rencana sistem non perpipaan air minum tersebar di seluruh distrik.

(4) jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. pengembangan jaringan air minum di kawasan perkotaan, meliputi:

1. pengembangan sistem jaringan primer dan sekunder dengan mengikuti pola jaringan jalan dan peletakan bangunan;
2. pembangunan bangunan pengambilan air pada sumber air baku;
3. pembangunan instalasi pengolah air minum di pusat-pusat kegiatan; dan

4. pembangunan bangunan penyimpan air di pusat-pusat kegiatan dan kampung-kampung.

b. pengembangan jaringan air minum di kawasan perdesaan, meliputi:
   1. pembangunan IPAS (Instalasi Pengolah Air Sederhana) pada daerah-daerah yang dominan menggunakan sumber air permukaan;
   2. pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH) komunal pada daerah yang kekurangan sumber air tanah maupun air permukaan;
   3. penyediaan pelayanan air minum dengan menggunakan jaringan tunggal yang dikelola dan dipelihara oleh masyarakat; dan
   4. pembuatan hidran dan MCK umum dengan memanfaatkan air dari sumber mata air dan air tanah dangkal atau menggunakan sumur bor yang dalam

(5) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. pembangunan sistem pembuangan limbah domestik komunal dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik; dan
   b. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

(6) Sistem jaringan drainase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. saluran primer, berupa sungai-sungai yang menjadi saluran buangan air permukaan akhir;
   b. saluran sekunder, berupa saluran penghubung saluran drainase jalan dengan saluran primer; dan
   c. saluran tersier, berupa saluran drainase yang ada di sepanjang jalan di sepanjang jalan utama Kota Tiom dan jalan kolektor primer lainnya yang tersebar di seluruh distrik.

(7) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. dari perkampungan menuju kawasan bandara Kuyawage di Distrik Kuyawage;
   b. dari perkampungan menuju kawasan bandara Makki di Distrik Makki;
   c. dari perkampungan menuju kawasan bandara Pirime di Distrik Pirime;
   d. dari perkampungan menuju kawasan bandara Tiom di Distrik Tiom;
   e. dari perkampungan menuju kawasan bandara Danime di Distrik Gamelia;
   f. dari perkampungan menuju kawasan bandara Tiomneri di Distrik Tiomneri;
   g. dari perkampungan menuju kawasan bandara Dimba di Distrik Dimba; dan
   h. dari perkampungan menuju kawasan bandara Tinggipura di Distrik Balingga;
   i. dari perkampungan menuju jalan lokal di Distrik Poga

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri atas :

a. Kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat;
d. suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. rawan bencana alam; dan
f. lindung geologi;

Paragraf 1
Hutan Lindung
Pasal 26

Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, tersebar di Distrik Tiom, Kuyawage, Tiomneri, Malagaineri, Pirime, Dimba, Gamelia, Poga, dan Makki.

Paragraf 2
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
Pasal 27

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa kawasan resapan air.
(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar Tiom, Gamelia, Dimba, Tiomneri, Malagaineri, Makki, Pirime, dan Kuyawage.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 28

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas :

a. kawasan sempadan sungai;
b. kawasan sekitar danau;
c. kawasan sekitar mata air;
d. kawasan lindung spiritual dan kawasan kearifan lokal lainnya; dan
e. ruang terbuka hijau perkotaan.

(1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 100 meter dari tepi sungai Tiom, Malagai, Wanuga, dan Makki; dan
b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 50 meter dari tepi sungai Balim, Pit, Kalikabir, Yu, dan Waruga.

(1) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi dataran sepanjang tepian danau Habema di Distrik Pirime dan Balingga, dengan ketentuan:

a. daratan dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang air danau tertinggi; atau

b. daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau.

(3) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi dataran sekitar mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter dari mata air.

(4) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. Distrik Makki;
   b. Distrik Pirime; dan
   c. Distrik Tiom.

(5) Ruang terbuka hijau perkotaan (RTHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. kawasan minimal seluas 50% dari luas perkotaan Tiom-Pirime-Makki; dan
   b. kawasan minimal seluas 40% dari luas ibukota distrik lainnya.

Paragraf 3
Kawasan Pelestarian Alam
Pasal 29

(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, yaitu kawasan taman nasional.

(2) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Taman Nasional Lorentz, meliputi seluruh di Distrik Malagaineri, Kuyawage, Balingga, Pirime, dan Makki;

(3) Taman Nasional Lorentz sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain merupakan kawasan lindung nasional, juga merupakan kawasan strategis nasional, sekaligus merupakan Situs Warisan Alam Dunia oleh UNESCO dan Warisan Alam ASEAN oleh negara-negara ASEAN.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 30

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, terdiri atas :
   a. kawasan rawan tanah longsor;
   b. kawasan rawan banjir; dan
   c. kawasan rawan hujan salju.

(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi seluruh distrik.

(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Distrik Kuyawage.

(4) Kawasan rawan hujan salju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Distrik Kuyawage

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 31

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas :
   a. kawasan cagar alam geologi;
   b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan

c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

(2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan yang memiliki keunikan bentang alam ngarai/lembah dan karst, di Distrik Malagaineri, Tiom, Pirime, Makki, Tiomneri, Dimba, dan Poga.

(3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kawasan rawan gempa bumi, meliputi seluruh kabupaten; dan
b. kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Distrik Malagaineri, Balingga, dan Pirime.
c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan imbuhan air tanah di Distrik Kuyawage, Malagaineri, Balingga, dan Pirime

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 32

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri atas :

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri atas :

a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Distrik Malagaineri, Tiom, Tiomneri, dan Dimba.

(3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Distrik Malagaineri, Kuyawage, Tiom, Tiomneri, Balingga, Pirime, Makki, Dimba, Poga, dan Gamelia

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Pasal 34

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdapat di Distrik Makki, Pirime, Tiom, Gamelia, Poga, dan Dimba

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 35

1. Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
   b. kawasan peruntukan hortikultura;
   c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
   d. kawasan peruntukan peternakan.
2. Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Distrik Malagaineri, Makki, Tiomneri, Pirime, Gamelia, Tiom, dan Poga.
3. Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Distrik Tiom, Pirime, dan Makki.
4. Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. perkebunan kopi di Distrik Dimba, Gamelia, Pirime, Makki, Tiom, dan Tiomneri; dan
   b. perkebunan buah merah yang merupakan tanaman terpadu dengan kawasan hutan, tersebar di Distrik Balingga, Kuyawage, Malagaineri.
5. Kawasan sentra peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi usaha terpadu dengan rumah tangga di Distrik Tiom, Kuyawage, Tiomneri, Malagaineri, Pirime, Gamelia, Poga, dan Makki.
6. Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 36

a. Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, yaitu kawasan peruntukan perikanan budidaya dengan skala masyarakat.
b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Distrik Tiom, Pirime, Gamelia, dan Makki.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 37

1. Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, terdiri atas:
   1. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
   2. peruntukan kawasan pertambangan mineral.
2. Kawasan potensial pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh distrik di Kabupaten Lanny Jaya.
3. Kawasan potensial pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pertambangan batubara, tersebar di seluruh distrik di Kabupaten Lanny Jaya.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Perindustrian
Pasal 38

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, berupa industri rumah tangga terdiri atas:

a. sentra industri kerajinan tangan di setiap distrik;
b. sentra industri madu di Distrik Tiom, Dimba, Pirime, dan Makki; dan
c. sentra industri pengolahan buah merah di Distrik Kuyawage, Balingga, dan Malagaineri

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Parawisata
Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, terdiri atas pariwisata alam.
(2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. air terjun di Distrik Tiomneri;
    b. goa alam di Distrik Malagaineri dan Tiom;
    c. sungai berarus deras di Distrik Malagaineri dan Tiomneri; dan
    d. pemandangan alam lembah indah di Distrik Kuyawage

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, terdiri atas permukiman perkotaan dan kampung.
(2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. permukiman perkotaan Tiom, Pirime, dan Makki; dan
    b. permukiman perkotaan Poga.
(3) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 142 kampung yang sudah berkoordinat yang tersebar di setiap distrik.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 41

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, yaitu kawasan pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas:

a. Polres di Kota Tiom Distrik Tiom;
b. Kodim di Kota Tiom Distrik Tiom;
c. Polsek di setiap distrik; dan
d. Koramil di setiap distrik.

Pasal 42

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 dapat

dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Lanny Jaya.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 43

1. Kawasan strategis, terdiri atas:
   a. Kawasan Strategis Nasional;
   b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
   c. Kawasan Strategis Kabupaten.
2. Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Kawsaan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a yaitu kawasan strategis daya dukung lingkungan berupa Taman Nasional Lorentz.

Pasal 45

(1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
   b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
   c. Kawasan strategis pengelolaan kawasan ekonomi rendah karbon.

(2) Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yautu Kawasan strategis ekonomi Pegunungan Tengah Bagian Tengah.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu wilayah Pegunungan Tengah, yang merupakan wilayah rawan bencana dan wilayah bergambut.

(4) Kawasan strategis pengelolaan kawasan ekonomi rendah karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu meliputi seluruh Kabupaten Lanny Jaya.

Pasal 46

1. Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi:
      1. kawasan perkotaan Tiom-Pirime-Makki;
      2. kawasan tertinggal Kuyawage, Balingga, dan Dimba; dan
      3. kawasan agropolitan Dimba.

b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam meliputi pengembangan mikro hidro sungai Malagai dan sungai Tiom.

Pasal 47

1. Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
2. Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 48

(1) Pemanfaatan ruang wilayah berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
(2) Pemanfaatan ruang wilayah memperhatikan hak ulayat dan/atau masyarakat adat pada lokasi pemanfaatan ruang yang bersangkutan.
(3) Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
(4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan; dan
(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangan.
(2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh Bupati Lanny Jaya bekerjasama Kepala Distrik.
(3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
(4) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
    a. ketentuan umum peraturan zonasi;
    b. ketentuan perizinan;
    c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
    d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 51

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
   c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
      1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
      2. kawasan sekitar prasarana energi;
      3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
      4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;

(3) Peraturan zonasi untuk jaringan prasarana wilayah disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah;
   b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah; dan
   c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 52

1. Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
2. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
3. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
   a. izin sektoral (kegiatan), terdiri atas izin prinsip dan izin tetap;
   b. izin pertanahan, terdiri atas izin lokasi dan izin hak atas tanah;
   c. izin perencanaan dan bangunan, terdiri atas izin peruntukan penggunaan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
   d. izin lingkungan, terdiri atas Izin HO (undang-undang gangguan), Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

e. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) bagi unit usaha industri setelah perusahaan mendapatkan izin lingkungan;
f. Izin Perluasan Kawasan Industri bagi unit yang telah memiliki IUKI dan ingin melakukan perluasan;
g. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
h. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
i. Izin usaha jasa lingkungan; dan
j. Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan.

(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 54

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 56

(1) Insentif dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah.

(2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada para kepada masyarakat termasuk swasta.

(4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(5) Insentif kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk:
a. pemberian kompensasi;
b. urun saham;
c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau
d. penghargaan.

(6) Insentif kepada masyarakat diberikan dalam bentuk:
a. keringanan pajak;
b. pemberian kompensasi;
c. imbalan;

d. sewa ruang;
e. urun saham;
f. penyediaan infrastruktur;
g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
h. penghargaan.

Pasal 57

Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), terdiri atas :

a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
b. pengenaan pajak yang tinggi;
c. pengenaan kompensasi; dan/atau
d. penalti

Pasal 58

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Bupati dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 59

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
    a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
    b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
    c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
    g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 60

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
    a. peringatan tertulis
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
a. peringatan tertulis
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pembongkaran bangunan;
f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
g. denda administratif.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB IX
KELEMBAGAAN
Pasal 61

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor dan antar daerah dibidang penataan ruang, Bupati membentuk BKPRD.
(2) BKPRD berfungsi sebagai lembaga yang membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 62

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 63

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 64

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 65

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 66

(1) Masyarakat dapat berperan dalam penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan RTRW.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
   a. masukan mengenai:
      1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
      2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
      3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
      4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
      5) pengidentifikasian tentang pemanfaatan ruang sesuai dengan kearifan lokal melalui pemetaan.
   b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. memberi masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
e. pengajuan gugatan pembatalan izin dan atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 67

1. Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
3. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 68

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 69

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 70

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

(3) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 71

(1) Setiap orang dan korporasi yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang dan korporasi yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

(4) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koorporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
   a. pencabutan izin usaha;
   b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
   c. pembatalan proses penyelesaian izin usaha.

(5) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :
   a. semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
   b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
   c. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
      1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
      2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan pemanfaatan ruangnya sah menurut rencana tata ruang sebelumnya, dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sesuai fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
      3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
      4) Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas harus memperhatikan indikator sebagai berikut :
         a) memperhatikan harga pasaran setempat;
         b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan

c) sesuai dengan kemampuan daerah.

5) Penggantian akibat kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lanny Jaya dan Provinsi Papua yang membatalkan/mencabut izin.

d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini.

e. pemanfaatan ruang didaerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :

1) Yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

2) Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 73

RTRW Kabupaten Lanny Jaya ini digunakan sebagai pedoman bagi :

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;

b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemafaatan raung dalam wilayah kabupaten;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupten dan antar distrik, serta keserasian antar sektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

f. penataan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 74

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2014-2034 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial kabupaten yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, provinsi, kabupaten dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

Pasal 75

Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2014-2034 dilengkapi dengan Buku Fakta Analisis, Buku Rencana dan Album Peta dengan skala minimal 1:50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Lanny Jaya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten lanny Jaya

Ditetapkan di : Tiom

Pada tanggal : 29 Desember 2014

BUPATI LANNY JAYA,

CAP/TTD

BEFA YIGIBALOM, SE, M.Si

Diundangkan di Tiom

pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LANNY JAYA,

CAP/TTD

CRISTIAN SOHILAIT, ST, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2013 NOMOR 05

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LANNY JAYA
TAHUN 2014-2034

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Oleh karena itu, RTRW Kabupaten Lanny Jaya disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, kondisi fisik Kabupaten Lanny Jaya yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Dalam upaya mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan perlu ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Kabupaten.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRW Kabupaten Lanny Jaya yang merupakan matra spasial dalam pembangunan daerah yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien. RTRW Kabupaten Lanny Jaya memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusat kegiatan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya, serta kawasan strategis kabupaten. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW Kabupaten Lanny Jaya juga menetapkan arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang

yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Dalam rangka memenuhi aspek pengaturan penataan ruang wilayah Kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten ini memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

a. tujuan penataan ruang;
b. kebijakan dan strategi penataan ruang;
c. rencana struktur ruang yang dibentuk;
d. pola ruang yang membagi kawasan lindung dan budidaya;
e. kawasan strategis yang akan dikembangkan;
f. arahan pemanfaatan ruang dalam bentuk indikasi program;
g. ketentuan pengawasan dan pengendalian ruang;
h. hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaidasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraanpenataan ruang; dan
j. ketentuan peralihan dan penyelesaian hukumnya

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 5

ayat (1)

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi

ayat (2)

Penyusunan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Otonomi daerah dan Otonomi khusus Papua yang merupakan peluang untuk dapat menentukan arah pengembangan wilayahnya guna mengejar ketertinggalan pembangunan selama ini;
2. Kondisi fisik willayah kabupaten yang memiliki keanekaragaman hayati dan dominasi tutupan lahan rawa berair;
3. Kondisi demografi dan sosial budaya masyarakat kabupaten yang masih memegang nilai-nilai adat leluhur; dan
4. Potensi sumber daya alam yang meliputi sumber daya tanah, sumber daya hutan, sumber daya air, sumber daya udara, serta sumber daya pesisir dan kelautan

Pasal 6

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten

Pasal 7

Ayat (1)

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah pola struktur yang menggambarkan jaringan-jaringan utama yang membentuk dan mengarahkan perkembangan pola ruang di wilayah Kabupaten di masa mendatang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pusat Perkotaan disusun secara berhirarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah Kabupaten.

Pengertian dan kriteria penetapan PKL mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua.

Pusat Pengembangan Kawasan Distrik (PPK) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri dan juga distrik-distrik yang berada di sekitarnya

Pusat Pengembangan Kegiatan Lokal (PPL) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pusat Pengembangan Pelayanan Distrik (PPK) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri dan juga distrik-distrik yang berada di sekitarnya

Ayat (4)

Pusat Pengembangan Pelayanan Lokal (PPL) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi Papua yang terkait langsung dengan Kabupaten.

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, dan kawasan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

a. kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar sungai/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
e. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, dan kawasan lainnya yang bersifat konservasi lingkungan hidup.

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, dan kawasan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

ayat (1)

Huruf a

Hutan Produksi tetap adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Hutan Produksi dapat dikonbersi adalah Hutan yang dialokasikan untuk alih fungsi dengan intensitas rendah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “Kawasan peruntukan Lainnya” adalah kawasan yang diperuntukaan untuk kegiatan tertentu.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh minimal terhadap:

a. ruang di wilayah kabupaten dan sekitarnya;
b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai strategis diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Aturan Zona merupakan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan yang diatur. Naskah aturan (*zoning text*) dan peta aturan (*zoning map*) dtetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Ayat (3)

Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah Badan Ad Hoc yang dibentuk oleh Bupati dengan tugas melaksanaan Perencanaan Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan ruang

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

LAMPIRAN I :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2014 - 2034

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN LANNY JAYA

LAMPIRAN II :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2014 - 2034

PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN LANNY JAYA

LAMPIRAN III :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2014 - 2034

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN LANNY JAYA

LAMPIRAN IV:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN KABUPATEN LANNY JAYA 2013-2033 RENCANA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH TAHUN 2014-2035

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					PJM-1 Thn 2014-2018					PJM-2 19-	PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5			
A.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**											
1.	***Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan***											
	1.1 Pemantapan Fungsi Pusat Kegiatan											
	✓ Optimalisasi sarana sosial ekonomi untuk mendukung fungsi pusat kegiatan	Seluruh Distrik	APBN, APBD, Swasta	PU, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan,	■	■	■	■	■	■	■	■
	✓ Pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal sarana sosial ekonomi	Semua distrik	APBD, swasta	PU, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan	■	■	■	■	■	■	■	■
	✓ Penyusunan rencana detail kawasan perkotaan	Distrik Makki, Distrik Pirime, Distrik Tiom DAN Distrik Poga	APBN, APBD	Bappeda	■	■	■	■	■			
	1.2 Percepatan Pengembangan Pusat Kegiatan											
	✓ Pembangunan sarana sosial ekonomi untuk mendorong fungsi PKL dan PPK sebagai pusat SSWP	Perkotaan Tiom di Distrik Tiom, Pirime, Makki; Perkotaan Poga di Distrik Poga	APBN, APBD, swasta	PU, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, dan Perikanan						■	■	■
	1.3 Mendorong Perkembangan Pusat Kegiatan Baru	Distrik Tiomneri Distrik Melagaineri Distrik Dimba Distrik Balingga Distrik Kuyawage	APBD, swasta	Bappeda, PU, Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, dan Perikanan							■	■

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					PJM-1 Thn 2014-2018					PJM-2 19-	PJM-3	PJM-4
		Distrik Gamelia										
	1.4 Pengembangan data base kampung	Semua distrik	APBD, swasta	Bappeda, BPS, Bagian Pemerintahan	■	■	■	■	■	■		
2.	***Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah***											
	2.1 Perwujudan Sistem Transportasi Darat											
	✓ Pemeliharaan jaringan jalan	Tiap distrik	APBN, APBD	PU, Perhubungan	■	■	■	■	■	■	■	■
	✓ Pembangunan jalan baru	- Tiom-Malagaineri-Kuyawage - Tiom-Gamelia-Poga - Tiom-Tiomneri-Tolikara - Makki-Danime-Poga - Tiom-Balingga-Kuyawage - Gamelia- Poga-Dimba - Pirime-Balingga-Kuyawage	APBD	PU, Perhubungan	■	■	■	■	■	■	■	
	✓ Optimalisasi dan peningkatan terminal tipe C	Distrik Tiom, Distrik Poga	APBD	PU, Perhubungan	■	■	■	■	■	■	■	■
	✓ Peningkatan pelayanan angkutan umum	Semua distrik	APBD	Perhubungan	■	■	■	■	■	■	■	■
	✓ Pengembangan sistem transportasi terpadu	Semua distrik	APBD, swasta	Perhubungan						■		■
	2.2 Perwujudan Sistem Transportasi Udara											
	✓ Optimalisasi pelayanan bandara	Distrik Tiom	APBD	Perhubungan	■	■	■	■	■	■	■	■
	✓ Pengembangan pelayanan bandara	- Bandara Tinggipura di Distrik Balingga - Bandara Udara Pirime di	APBN, APBD	Perhubungan	■	■	■	■	■	■	■	■

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					PJM-1 Thn 2014-2018					PJM-2 19-	PJM-3	PJM-4
		Distrik Pirime - Bandara Kuyawage di Distrik Kuyawage - Bandara Makki di Distrik Makki; - Bandar Udara Dimba di Distrik Dimba; - Bandar Udara Malagai di Distrik Malagaineri; - Bandar Udara Danime di Distrik Gamelia; - Bandar Udara Tiomneri di Distrik Tiomneri.										
	✓ Peningkatan keamanan kawasan bandara	- Bandara Tinggipura di Distrik Balingga - Bandara Udara Pirime di Distrik Pirime - Bandara Kuyawage di Distrik Kuyawage - Bandara Makki di Distrik Makki; - Bandar Udara Dimba di Distrik Dimba; - Bandar Udara Malagai di Distrik Malagaineri; - Bandar Udara Danime di	APBD	PU, Perhubungan	■	■	■	■	■	■	■	■

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					PJM-1 Thn 2014-2018					PJM-2 19-	PJM-3	PJM-4
		Distrik Gamelia; - Bandar Udara Tiomneri di Distrik Tiomneri.										
	2.3 Perwujudan Sistem Jaringan Kelistrikan											
	✓ Optimalisasi sistem kelistrikan	Semua distrik	APBD	PLN	■	■	■	■	■	■	■	■
	✓ Pengembangan pelayanan kelistrikan hingga menjangkau seluruh pusat-pusat distrik	Semua distrik	APBD	PLN						■	■	
	✓ Optimalisasi PLTD, PLTMH, PLTS	- PLTD di Distrik Tiom; - PLTMH di Distrik Makki; - PLTS di Distrik Pirime, Kuyawage, Balingga, Poga, Gamelia, Dimba, Tiomneri, Malagaineri.	APBN, APBD	PLN	■	■	■	■	■	■	■	■
	✓ Studi pemanfaatan energi alternatif terbarukan	- Distrik : Makki, Pirime, Kuyawage, Balingga, Poga, Gamelia, Dimba, Tiomneri, Malagaineri.	APBN, APBD, swasta	Bappeda, PLN, swasta	■	■	■	■	■	■	■	■
	2.4 Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	✓ Optimalisasi pemanfaatan jaringan telepon kabel	Distrik Tiom	APBD	Telkom						■	■	
	✓ Pengembangan jaringan telekomunikasi satelit	Semua Distrik	APBD, swasta	Telkom, swasta						■	■	
	✓ Pengaturan sistem BTS terpadu	Semua Distrik	APBD	Bappeda, Telkom						■		
	2.5 Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					PJM-1 Thn 2014-2018					PJM-2 19-	PJM-3	PJM-4
	✓ Optimalisasi pemanfaatan sumber air baku	Distrik:Tiom, Malagaineri	APBD	PU, PDAM	■	■	■	■	■	■	■	■
	✓ Pengembangan pemanfaatan sumber air baku	Distrik:Tiom, Malagaineri	APBD	Kehutanan, PU, PDAM						■	■	■
	2.6 Perwujudan sistem prasarana lingkungan											
	✓ Pembangunan TPST	Distrik : Makki, Poga	APBD, swasta	PU, Lingkungan Hidup, swasta	■	■	■	■	■			
	✓ Pengembangan sistem daur ulang sampah dan composting	Distrik : Makki, Poga	APBD, swasta	PU, Lingkungan Hidup, swasta	■	■	■	■	■	■		
	✓ Pembangunan TPA	Distrik Tiom	APBD	PU, Lingkungan Hidup						■		
	✓ Pembangunan sistem drainase	Distrik : Tiom, Makki, Pirime, Poga	APBD	PU, Bappeda						■	■	
	✓ Penmbangunan sistem pelayanan air minum	Semua Distrik	APBD	PDAM							■	■
	✓ Penyediaan jalur evakuasi bencana dan pengembangan sistemnya		APBD	Bappeda, PU, Kesehatan, Pendidikan	■	■	■	■	■			
	2.7 Perwujudan pengembangan sarana sosial ekonomi	Semua distrik	APBD	Bappeda, PU,	■	■	■	■	■	■	■	■
B.	**PERWUJUDAN POLA RUANG**											
1.	***Perwujudan Kawasan Lindung***											
	1.1 Rehabilitasi dan pemantapan kawasan lindung											
	✓ Wilayah air tanah karst	Semua distrik	APBN, APBD	Kehutanan	■	■	■	■	■	■	■	■
	✓ Ruang terbuka hijau perkotaan	Kawasan perkotaan Tiom, Poga	APBD, swasta	Kehutanan, Pertamanan	■	■	■	■	■	■	■	■
	1.2 Pengelolaan kawasan lindung											
	✓ Pengelolaan kawasan sempadan	Semua distrik	APBD	Kehutanan	■	■	■	■	■	■		

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					PJM-1 Thn 2014-2018					PJM-2 19-	PJM-3	PJM-4
	sungai											
	✓ Pengelolaan kawasan sempadan danau	Danau Habema	APBD	Kehutanan, PU, Pariwisata, dan Perikanan						■	■	
	✓ Pengelolaan kawasan sekitar mata air		APBD	Kehutanan, PU, Pariwisata, Lingkungan Hidup						■	■	
	✓ Pengelolaan kawasan lindung spiritual	Distrik Tiom, Makki, Pirime	APBD	Kehutanan, Pariwisata, Kebudayaan	■	■	■	■	■	■	■	■
2.	***Perwujudan Kawasan Budidaya***											
	2.1 Program rehabilitasi dan pengembangan hutan produksi;		APBD, swasta	Kehutanan							■	■
	2.2 Pengembangan budidaya tanaman pangan (termasuk yang berbasis sumberdaya lokal), hortikultura, perkebunan	Distrik: Malagaineri,Makki, Tiomneri, Pirime, Gamelia, Tiom dan Poga	APBD, swasta	Bappeda, Pertanian						■	■	■
	2.3 Pengembangan produksi komoditas perikanan (perikanan tangkap dan budidaya)	Distrik : Tiom, Pirime, Gamelia, Makki	APBD, swasta	Bappeda, dan Perikanan	■	■	■	■	■	■		
	2.4 Pengembangan peternakan	Distrik Tiom, Malagaineri, Pirime, Gamelia,Poga,Makki	APBD, swasta	Bappeda, dan Peternakan	■	■	■	■	■	■		
	2.5 Optimalisasi produksi pertambangan	Distrik	APBD, swasta	Pertambangan, Kehutanan, Lingkungan Hidup	■	■	■	■	■	■		
	2.6 Pengembangan obyek, destinasi, dan jasa pariwisata	Distrik Dimba, Kuyawage	APBD, swasta	Pariwisata, PU, Kehutanan, Industri dan Perdagangan,	■	■	■	■	■	■		

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					PJM-1 Thn 2014-2018					PJM-2 19-	PJM-3	PJM-4
				Perhubungan, Pendidikan								
	2.7 Penataan, pengembangan, dan pengendalian kawasan permukiman											
	✓ Penataan, pengembangan, dan pengendalian permukiman perkotaan	Kawasan perkotaan Tiom-Pirime-Makki. Kawasan perkotaan Poga	APBD, swasta	Bappeda, PU, Industri dan Perdagangan, Hankam, Pariwisata	■	■	■	■	■	■		
	✓ Identifikasi dan penataan permukiman kampung	Semua distrik	APBD, swasta	Bappeda, Pertanahan, BPS	■	■	■	■	■	■		
	2.7 Pengembangan kawasan perindustrian	Semua distrik	APBN, APBD, swasta	Bappeda, Industri dan Perdagangan						■	■	
	2.8 Penyelenggaraan penanggulangan bencana (tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana)	Semua distrik	APBN, APBD, swasta	Bappeda	■	■	■	■	■	■	■	■
	2.9 Penyusunan studi/penelitian/perencanaan pengembangan budidaya pertanian, perikanan, pariwisata, industri	Semua distrik	APBN, APBD, swasta	Bappeda, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Industri dan Perdagangan	■	■	■	■	■	■		
C.	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**											
	Kawasan Strategis Ekonomi	a. kawasan perkotaan Tiom-Pirime-Makki; b. kawasan tertinggal Kuyawage,Balingga, Dimba; c. kawasan agropolitan Dimba;	APBD, swasta	Bappeda, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Industri dan Perdagangan	■	■	■	■	■	■		

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					PJM-1 Thn 2014-2018					PJM-2 19-	PJM-3	PJM-4
	Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam	Pengembangan PLTMH Sungai Malagai dan Sungai Tiom	APBD, swasta	Bappeda, BLH, Kebudayaan	■	■	■	■	■	■		

BUPATI LANNY JAYA,

CAP/TTD

BEFA YIGIBALOM, SE, M.Si

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANNY JAYA,

CAP/TTD

CRISTIAN SOHILAIT, ST, M.Si

LAMPIRAN V:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN KABUPATEN LANNY JAYA 2014-2034 RENCANA ARAHAN PERATURAN ZONASI

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
A. STRUKTUR RUANG					
1. Sistem jaringan prasarana utama	1.1. Sistem jaringan transportasi darat:				
	1.1.1. jaringan jalan	a. Jalan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang	a. diperbolehkan menggunakan ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya b. diperbolehan menggunakan ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan c. pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas	a. diharuskan untuk menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan, sebagai berikut (ukuran minimal, diukur dari tepi badan jalan): • jalan arteri primer 15 meter; • jalan kolektor primer 10 meter; • jalan lokal primer 7 meter; • jembatan 100 meter ke arah hilir dan hulu. b. diperbolehkan membangun bangunan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan, dengan syarat tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan	a. memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan b. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan c. menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.		konstruksi jalan; c. disyaratkan bagi pengembangan kawasan baru dan pusat pertumbuhan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas untuk melengkapi dengan kajian analisis dampak lalu lintas. d. rencana jalan yang melalui kawasan lindung, bertopografi berat, dan kawasan ekosistem rentan, perlu dilakukan kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD.	
		b. Terminal Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.	a. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal	a. terminal dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal b. kegiatan selain kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan terminal yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal	a. kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	1.2. Sistem jaringan transportasi udara:				
	a. bandar udara umum	Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum	kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas	a. pemanfaatan ruang di daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk digunakan kegiatan lain yang tidak menganggu penyelenggaraan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo; b. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan; c. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk	kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				operasi penerbangan, memenuhi kajian khusus aeronautika, dan sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan d. pembangunan bandar udara yang berada atau bersinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD.	
2. Sistem prasarana lainnya	2.1. Sistem prasarana energi				
	a. Pembangkit listrik	Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.	pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik sesuai jarak aman dari kegiatan lain	a. kegiatan yang tidak mengganggu operasionalisasi dan keamanan pembangkit listrik b. pembangunan pembangkit listrik yang berada atau bersinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik,	kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi pembangkit listrik

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD	
	b. Sistem prasarana listrik	Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.	kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik	a. kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik b. pembangunan jaringan listrik yang berada di kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD	c. kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; d. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi
	2.2. sistem jaringan telekomunikasi	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya.	kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi	a. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi (BTS-*Base Tranceiver Station*) yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas	kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				kawasan di sekitarnya. b. pembangunan menara di kawasan bandar udara/pelabuhan, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung, kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, dan kawasan pengendalian ketat lainnya wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.	
	2.3. sistem jaringan sumber daya air	Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Jaringan sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.	a. kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai b. pengelolaan pemanfaatan ruang dalam sistem DAS terpadu; c. penentuan zonasi dalam rencana tata ruang terinci membagi kawasan dalam 3 zona, dengan kegiatan sebagai berikut: o pada zona I, yaitu kawasan resapan yang berada paling dekat dengan mata air: hanya boleh dimanfaatkan sebagai kawasan pelestarian dan	Pada zona II: diperbolehkan bagi beberapa kegiatan budidaya pertanian kering.	a. Kegiatan yang mengganggu fungsi sungai dan waduk, CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air. b. Pada zona I: o kegiatan pengolahan dan penggunaan lahan, permukiman, kandang ternak, lokasi penimbunan sampah, dan potensi polutan lainnya; o tidak boleh ada aliran air

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
			kawasan lindung yaitu hutan; ○ Zona II, daerah resapan diatas Zona I (artinya daerah yang lebih ke arah hulu dari zona I): dibolehkan bagi kegiatan pengolahan lahan secara sangat terbatas; ○ Zona III, daerah resapan yang paling hulu dibandingkan posisi zona I dan II (artinya daerah paling jauh dari mata air): dibolehkan bagi beberapa kegiatan pengolahan dan kegiatan masyarakat, antara lain pertanian terpadu.		permukaan (*run off*) yang dapat masuk ke dalam kolam penampungan alami, untuk menghindari adanya berbagai material polutan yang terbawa aliran air permukaan, sehingga akan menurunkan kualitas sumberdaya air. c. Pada zona II: ○ kegiatan permukiman, penimbunan sampah/bahan kimia, kandang ternak, serta kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran.
B. **POLA RUANG**					
B.1. Kawasan Lindung					
1. kawasan hutan lindung		• kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar bawahannya sebagai	a. pemantapan kawasan hutan lindung melalui kegiatan pengukuhan kawasan dan pembentukan zonasi pengelolaan b. pengelolaan kawasan	a. kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas dengan luasan	a. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah,

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah. • kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya ≥ 175; • kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng ≥ 40%; • kawasan hutan yang mempunyai ketinggian ≥ 2.000 meter di atas permukaan laut. • kawasan hutan yang memiliki jenis tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan ≥15% • kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 meter	hutan dilakukan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);	tetap, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung; c. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung; d. diperbolehkan untuk kegiatan penambangan dalam kawasan hutan lindung hanya dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akifer air tanah. e. membangun infrastruktur diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi fungsi lindung, didahului kajian	fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; b. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD.	
2. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	kawasan bergambut	ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih	a. menata dan mengelola kawasan bergambut sebagai bagian dari kesatuan pengelolaan kawasan	a. kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung; c. kegiatan pendidikan dan penelitian dapat dilakukan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung; d. kegiatan penambangan dalam kawasan hutan lindung diperbolehkan hanya dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak	a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akifer air tanah e. pembangunan infrastruktur di kawasan bergambut dilarang mengganggu fungsi hidrologi dan mengakibatkan terjadinya fragmentasi lingkungan kawasan bergambut (fragmentasi lingkungan: terpisahnya unit ekosistem menjadi beberapa sub-unit yang tidak saling berinterksi) f. pembangunan infrastruktur diperbolehkan dengan didahului kajian mendalam tentang kelayakan teknis, ekonomis, ekologis, sosial budaya, legalitas, dan kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan Tim BKPRD.	
	kawasan resapan air	kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan	a. menata dan mengelola kawasan resapan air sebagai bagian dari kesatuan pengelolaan kawasan	a. kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara	a. semua jenis kegiatan termasuk pembangunan infrastruktur yang mengganggu fungsi

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				terbatas, dan tidak mengurangi fungsi resapan air b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi resapan air; c. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;	resapan air
	kawasan hutan rawa	Hutan rawa adalah hutan yang berada di daerah berawa, sehingga mempengaruhi proses pembentukan tanahnya: • Hutan rawa dataran rendah bertajuk rata dan agak terbuka, kadang rapat • Hutan rawa dataran rendah campuran bervegetasi rawa terbuka dengan alang-alang sampai setinggi 1 meter • Hutan rawa *Campnosperma brevipetiolata* terutama di rawa gambut dan aluvial; tinggi pepohonan bisa mencapai 30-35 meter, tajuk rapat dan rata, daun besar. • Hutan rawa *Melaluca*	a. menata dan mengelola kawasan resapan air sebagai bagian dari kesatuan pengelolaan kawasan	a. kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung; c. kegiatan pendidikan dan penelitian dapat dilakukan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi	semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		sepanjang tahun terendam, hutannya hanya memiliki satu lapisan tajuk yang merata dan murni sampai setinggi 30 meter. • Hutan rawa *Erythrina*, tegakan rapat tanpa lapisan subtajuk yang jelas. • Hutan rawa *Pandanus*, membentuk komunitas terbuka yang tinggi (8-10 meter), selalu atau secara berkala tergenang air tawar dan paya. • Rawa *Metroxylon sagu*; rawa sagu murni dan sagu di hutan campuran. • Rawa gambut dataran tinggi terdiri dari perairan kecil terbuka yang bersifat asam pada tanah datar, topografinya terangkat pada ketinggian > 2.000 meter di daerah yang bercurah hujan tinggi (300 cm/tahun).		lindung; d. pembangunan infrastruktur di kawasan bergambut dilarang mengganggu fungsi hidrologi dan mengakibatkan terjadinya fragmentasi lingkungan kawasan hutan rawa e. pembangunan infrastruktur diperbolehkan dengan didahului kajian mendalam tentang kelayakan teknis, ekonomis, ekologis, sosial budaya, legalitas, dan kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan Tim BKPRD.	
	sempadan sungai	Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.	bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu: ○ bangunan prasarana sumber daya air; ○ fasilitas jembatan dan dermaga; ○ jalur pipa gas dan air minum; ○ rentangan kabel listrik dan telekomunikasi ○ kegiatan lain sepanjang	Bangunan dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status *quo (*kondisi tidak boleh mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan) dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai, sesuai prioritas dan	sempadan sungai yang terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: ○ menanam tanaman selain rumput; ○ mendirikan bangunan; ○ mengurangi dimensi

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Ketentuan garus sempadan sungai: • Garis sempadan sungai besar (luas DAS lebih besar dari 500 Km2) tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 m untuk sungai di dataran tinggi dan 500 meter di dataran rendah, diukur dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. • Garis sempadan sungai kecil (luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km2) tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Beberapa sungai memiliki karakter yang spesifik misalnya berkelok-kelok (*meandering*), yang palung sungainya berubah sangat	tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya tanaman sayur-mayur.	kemampuan serta dengan partisipasi masyarakat.	tanggul

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		dinamis. Penentuan garis sempadan untuk sungai seperti ini perlu dilakukan secara lebih hati-hati dan agar ditentukan lebih lebar mengikuti batas terluar alur dinamisnya.			
	kawasan sekitar danau atau waduk	Kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian danau/waduk: • daratan dengan jarak 500 meter dari titik pasang air danau/waduk tertinggi; atau • daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau/waduk.	a. kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; b. kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan; c. dibolehkan untuk RTH, pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi dan/atau mempertahankan bentuk badan air. b. bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu: o bangunan prasarana sumber daya air; o fasilitas jembatan dan dermaga; o jalur pipa gas dan air minum; o rentangan kabel listrik dan telekomunikasi		a. semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air; b. semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup.
	kawasan sekitar mata air	Kawasan tertentu di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian mata air. Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata	bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu: o bangunan prasarana sumber daya air; o fasilitas jembatan dan dermaga; o jalur pipa gas dan air		a. semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air; b. semua kegiatan yang

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		air paling sedikit berjarak 200 m dari pusat mata air.	minum; o rentangan kabel listrik dan telekomunikasi		mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup.
	Ruang terbuka hijau kota/perkotaan	Ruang terbuka hijau kota/perkotaan merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	a. kegiatan menambah RTH; b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; c. pendirian bangunan hanya untuk penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya	diawasi dengan ketat bagi kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.	a. kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; b. kegiatan mendirikan bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya.
	kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya	Perlindungan pada kawasan lindung spiritual digunakan untuk mengakui dan memberikan ruang kepada masyarakat lokal dalam menjalankan pola hidup tradisionalnya yang tergantung pada hutan atau ekosistem lainnya.	a. kegiatan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi yang sesuai dengan aturan masyarakat adat;	a. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan sebagai tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; b. kegiatan yang tidak merusak/mengganggu aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; c. kegiatan yang tidak merusak/mengganggu tempat-tempat penting yang harus dilindungi.	kegiatan yang bersifat alih fungsi kawasan dan yang mengganggu aspek spiritual dan kearifan lokal yang dilindungi
3. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	taman nasional	a. memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik; b. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang	Pemanfaatan untuk kegiatan: o penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; o pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;	a. pembangunan sarana dan prasarana di zona inti secara tidak permamen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan b. pembangunan sarana	a. Kegiatan yang mengganggu proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya; b. Kegiatan yang dapat

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		masih utuh; c. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan d. merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.	○ penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; ○ pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; ○ pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam kawasan cagar alam; ○ pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.	dan prasarana di zona rimba atau zona perlindungan bahari untuk wilayah perairansepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas c. pengusahaan pariwisata alam dan pemanfatan kondisi/jasa lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfatan kondisi/jasa Iingkungan di zona pemanfaatan d. pemanfaatan potensi dan kondisi sumberdaya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku di zona tradisional e. pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat di zona khusus.	mengakibatkan perubahan keutuhan potensi dan kawasan serta perubahan fungsi kawasan; c. Kegiatan yang mengganggu keutuhan potensi, kawasan, dan fungsi kawasan.
	kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan	Kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di darat dan di air	Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.	
4. kawasan rawan bencana alam	kawasan rawan tanah longsor	Kawasan yang berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material	a. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi: ○ Kegiatan dengan	a. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi:	d. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi:

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran. Klasifikasi tingkat kerawanan: ○ Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi: kawasan berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah dan cukup padat permukimannya, atau terdapat konstruksi bangunan sangat mahal atau penting. ○ Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang: kawasan berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah, namun tidak ada permukiman serta konstruksi bangunan yang terancam relatif tidak mahal dan tidak penting. ○ Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah: • berpotensi gerakan tanah tinggi, namun tidak ada risiko terjadinya korban jiwa terhadap manusia dan bangunan; • kurang berpotensi untuk mengalami longsoran, namun di dalamnya terdapat permukiman atau konstruksi	fungsi lindung b. Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang: ○ kegiatan dengan fungsi lindung ○ kegiatan budidaya terkendali c. Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah: ○ kegiatan-kegiatan pariwisata, hutan kota, hutan produksi	○ pembangunan/pengembangan pusat-pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukungnya diperbolehkan hanya prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (contohnya sistem drainase), serta jaringan prasarana pada tingkat pelayanan wilayah yang melintasi zona tersebut. ○ kegiatan non fisik dapat dilaksanakan dengan ketentuan khusus yang diarahkan dengan pendekatan konsep penyesuaian lingkungan ○ kegiatan pariwisata terbatas, hutan kota, hutan produksi, perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan	○ Kegiatan yang berdampak tinggi pada fungsi lindung ○ penebangan pohon tanpa aturan ○ pembebanan terlalu berlebihan pada lereng ○ penggalian dan pemotongan lereng. e. Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang: ○ kegiatan industri, pertambangan, permukiman, hutan produksi, perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan.

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		penting/mahal.		perikanan diperbolehkan dengan syarat memenuhi perlindungan sistem hidrologis kawasan. b. Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang: ○ kegiatan yang terkait dengan komponen pembentuk struktur ruang diperbolehkan dengan syarat tidak melampaui daya dukung lingkungan dan dilengkapi amdal ○ kegiatan pusat hunian dan jaringan prasarana pendukungnya (kecuali prasarana air bersih dan drainase) dapat dilaksanakan dengan beberapa persyaratan tertentu yang ketat ○ kegiatan dengan syarat tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan untuk pariwisata terbatas, hutan kota,	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				hutan produksi, perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan kegiatan hunian: c. Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah: ○ kegiatan pusat hunian, jaringan transportasi lokal, dan kegiatan sarana prasarana pendukung lainnya kecuali jaringan air bersih dan drainase diperbolehkan dengan dilengkapi amdal ○ kegiatan permukiman, pertambangan, hutan produksi, hutan kota, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan kegiatan lainnya, dengan persyaratan yang sama dengan persyaratan pada zona berpotensi longsor dengan	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				tingkat kerawanan sedang.	
	kawasan rawan banjir	Kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.	a. Kegiatan berfungsi lindung b. Kegiatan berfungsi budidaya	a. Kegiatan berfungsi budidaya disyaratkan mengembangkan rekayasa teknis sebagai upaya memasukkan air permukaan ke dalam tanah dengan cara mempercepat aliran air permukaan hingga dapat meresap ke dalam tanah yang memiliki kelulusan air yang palimg optimal	
5. kawasan lindung geologi	kawasan cagar alam geologi				
	a. kawasan keunikan batuan dan fosil;	• memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam; • memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil); • memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi; • memiliki tipe geologi unik; atau • memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.	○ pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan ○ pemanfaatan untuk kegiatan: - penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; - pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;	kehidupan dan penghidupan masyarakat asli yang ada di dalam kawasan cagar alam geologi dimungkinkan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem kawasan yang berkelanjutan melalui kearifan lokal yang dimilikinya	kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan keaslian kawasan
	b. kawasan keunikan bentang alam;	• memiliki bentang alam gumuk pasir pantai; • memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera,	○ pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan ○ pemanfaatan untuk	a. kehidupan dan penghidupan masyarakat asli yang ada di dalam kawasan	a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan keaslian kawasan

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik; • memiliki bentang alam goa; • memiliki bentang alam ngarai/lembah; • memiliki bentang alam kubah; atau • memiliki bentang alam karst: ○ kawasan Karst Kelas I ○ kawasan Karst Kelas II ○ kawasan Karst Kelas III	kegiatan: - penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; - pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; ○ Kawasan Karst Kelas III dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	cagar alam geologi dimungkinkan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem kawasan yang berkelanjutan melalui kearifan lokal yang dimilikinya b. Kawasan Karst Kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karsifikasi, merusak bentukbentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan karst c. untuk kawasaan karst kelas II: ○ kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, yaitu seteleh kegiatan tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan (Amdal atau UKL dan UPL)	b. kawasan karst kelas I tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan
	c. kawasan keunikan proses geologi	• kawasan poton atau lumpur vulkanik; • kawasan dengan kemunculan sumber api alami; atau • kawasan dengan kemunculan solfatara, fumaroia, dan/atau geyser.	○ pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan ○ pemanfaatan untuk kegiatan: - penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; - pendidikan dan peningkatan kesadartahuan		kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan keaslian kawasan

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
			konservasi alam;		
	kawasan rawan bencana alam geologi				
	a. kawasan rawan gempa bumi;	Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI).		a. diharuskan melakukan penataan ruang guna mencegah dan menghindari terjadinya korban jiwa dan harta serta dampak yang mungkin timbul ketika bencana itu terjadi; b. disyaratkan untuk mempertimbangkan daya dukung fisik lingkungan seperti pusat gempa dan sifat batuan; c. disyaratkan untuk memperhatikan faktor kemiringan lereng dan ketebalan lapisan tanah penutup untuk menghidari bahaya longsor; d. disyaratkan untuk memperhatikan konstruksi bangunan yang dirancang tahan atau ramah gempa, setidaknya mampu menahan goncangan gempa pada intensitas maksimal yang pernah terjadi, mempertimbangkan faktor keutamaan dan struktur bangunan, serta peta bahaya seismik; e. disyaratkan untuk membangun konstruksi	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				teknis sistem drainase yang tahan gempa; a. diharuskan menyediakan sarana dan prasarana penunjang tindak darurat ketika terjadi gempa bumi, seperti tempat pengungsian, rumah sakit darurat atau lapangan, dapur umum, instalasi penjernih air, sarana sanitasi, lapangan terbang atau helipad, dan sarana komunikasi.	
	b. kawasan rawan gerakan tanah;	Memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.		a. pada kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi, hanya dibolehkan untuk kawasan lindung dan tidak layak dibangun; b. pada kawasan dengan tingkat kerawanan menengah, dapat dibangun/ dikembangkan tetapi mempunyai persyaratan tertentu; c. pada kawasan dengan tingkat kerawanan rendah, dapat dibangun/ dikembangkan dengan konstruksi sederhana; d. pada kawasan dengan tingkat kerawanan sangat rendah, memiliki keleluasaan dibangun/ dikembangkan dengan berbagai konstruksi.	
	c. kawasan yang	Sempadan dengan lebar		a. diharuskan melakukan	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	terletak di zona patahan aktif;	minimal 250 meter dari tepi jalur patahan aktif.		penataan ruang guna mencegah dan menghindari terjadinya korban jiwa dan harta serta dampak yang mungkin timbul ketika bencana itu terjadi; b. disyaratkan untuk mempertimbangkan daya dukung fisik lingkungan seperti pusat gempa dan sifat batuan; c. disyaratkan untuk memperhatikan faktor kemiringan lereng dan ketebalan lapisan tanah penutup untuk menghidari bahaya longsor; d. disyaratkan untuk memperhatikan konstruksi bangunan yang dirancang tahan atau ramah gempa, setidaknya mampu menahan goncangan gempa pada intensitas maksimal yang pernah terjadi, mempertimbangkan faktor keutamaan dan struktur bangunan, serta peta bahaya seismik; e. disyaratkan untuk membangun konstruksi teknis sistem drainase yang tahan gempa; b. diharuskan menyediakan sarana dan prasarana	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				penunjang tindak darurat ketika terjadi gempa bumi, seperti tempat pengungsian, rumah sakit darurat atau lapangan, dapur umum, instalasi penjernih air, sarana sanitasi, lapangan terbang atau helipad, dan sarana komunikasi.	
	a. kawasan imbuhan air tanah;	• memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti; • memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau; • memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau • memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.	pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;	a. disyaratkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; b. disyaratkan menerapkan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.	
B.2. Kawasan Budidaya					
1. kawasan peruntukan hutan produksi	hutan produksi terbatas (HPT)	• memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 – 174; • kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam.	a. pengelolaan kawasan hutan dilakukan melalui KPH; b. pengembangan usaha hasil hutan kayu, pengembangan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; c. kepentingan pembangunan	a. disyaratkan bagi pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
			di luar kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi; d. kepentingan pertambangan melalui pemberian ijin pinjam pakai terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/ lingkungan	Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); b. disyaratkan untuk tetap mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai akibat erosi dan longsor; c. disyaratkan bagi kepentingan pertambangan terbuka dengan ketentuan khusus dan secara selektif.	
	hutan produksi tetap (HP)	• memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124; • kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.			
2. kawasan hutan rakyat		• kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik; • kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.	kegiatan pemanenan berdasarkan sistem tebang butuh		
3. kawasan peruntukan pertanian	pertanian Tanaman Pangan	• memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai	a. pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan	disyaratkan bagi kegiatan pertanian skala besar untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		kawasan pertanian; • ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi; • mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau • dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.	syarat yang diatur oleh pemerintah kabupaten dan atau oleh Kementerian Pertanian; b. kegiatan pertanian skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal; c. penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal; d. kawasan yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang.		
	pertanian lahan kering				
	hortikultura				
	kawasan peruntukan perkebunan	Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen			

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.			
	Kawasan peruntukan peternakan	Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.	Beberapa kabupaten di Papua memiliki potensi besar bagi pengembangan kegiatan peternakan. Ini belum terakomodasi dalam pedoman penyusunan RTRW Kabupaten.		
4. kawasan peruntukan perikanan	perikanan tangkap	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.	a. aktivitas pendukung aktivitas perikanan; b. pembangunan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan pembenihan.	a. disyaratkan bagi kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal; b. disyaratkan bagi industri perikanan yang menghasilkan limbah perikanan dan polusi (udara-bau) dihasilkan harus melengkapi RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal; c. disyaratkan bagi kegiatan perikanan skala besar untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat.	dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai untuk perikanan darat;
	budi daya perikanan				
	pengolahan ikan				

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
5. kawasan peruntukan pertambangan	mineral dan batubara	• memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi; • merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau • merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.	a. pembangunan fasilitas fisik meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor; b. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan; c. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan, kawasan lindung, dan industri dikembangkan secara serasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; d. kegiatan budidaya dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan yang di dalamnya baru terdapat izin usaha pertambangan eksplorasi; e. wilayah dalam kawasan peruntukan pertambangan yang sudah diberikan izin usaha pertambangan operasi produksi/ eksploitasi, masih dimungkinkan adanya kegiatan budidaya lain dengan ketentuan menyesuaikan dengan rencana penambangan dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak menjadi kendala bagi	a. disyaratkan untuk setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat; b. disyaratkan untuk kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil (tambang rakyat); c. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, dan pasca tambang disyaratkan agar tidak menimbulkan perselisihan dengan masyarakat setempat.	a. menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman; b. menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan.
	minyak dan gas bumi				
	air tanah di kawasan pertambangan				
	industri sedang				
	industri rumah tangga				

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
			aktivitas penambangan, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan eksploitasi.		
6. kawasan peruntukan pariwisata	pariwisata budaya	Memiliki obyek dengan daya tarik wisata; dan/atau mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. Kawasan peruntukan pariwisata dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.	a. pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata; b. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan c. pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata.	a. pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; b. disyaratkan adanya perlindungan terhadap situs peninggalan sejarah masa lampau;	
	pariwisata alam				
	Pariwisata buatan				
7. kawasan peruntukan permukiman	permukiman perkotaan	kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya	a. kegiatan perdagangan jasa sesuai dengan skalanya; b. pengembangan fasum dan fasos sesuai skalanya; c. pembangunan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.	a. disyaratkan penetapan amplop bangunan; meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan; b. disyaratkan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan	
	Permukiman perdesaan/ kampung				
6. kawasan peruntukan lainnya		Lahan bergambut, savana, padang rumput, hutan rawa, dll	Ekosistem khas Papua yang belum termasuk dalam kelompok kawasan budidaya adalah lahan bergambut di luar		

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
			kawasan lindung, savana, padang rumput, hutan rawa, dll. Kawasan ini termasuk rentan terhadap perubahan, tetapi masih memungkinkan sebagai kawasan budidaya. Pedoman penyusunan RTRW Kabupaten perlu diperkaya dengan ketentuan jenis kawasan ini.		

BUPATI LANNY JAYA,

CAP/TTD

BEFA YIGIBALOM, SE, M.Si

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANNY JAYA,

CAP/TTD

CRISTIAN SOHILAIT, ST, M.Si